



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN ASAS PANCASILA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang
Ilmu Hukum**

Oleh:

THERESIA RIFENI WIDIARTATI

NPM: 0806426130

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Theresia Rifen Widiartati

NPM : 0806426130

Tanda tangan :

Tanggal : 8 Juli 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

Nama : Theresia Rifen Widiartati
NPM : 0806426130
Fakultas : Hukum
Judul Tesis : Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau Dari Perspektif
Hak Asasi Manusia

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji dan Telah Diterima
Sebagai Bagian Persyaratan yang Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum, pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
pada tanggal 28 Juni 2010**

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Ketua Sidang/Pembimbing/Penguji

Prof. Dr. Abdul Barie Azed, S.H., M.H.
Penguji

Dr. Fatmawati, S.H., M.H.
Penguji

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala karunia, dan hikmatNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Kehidupan Kenegaraan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia di Jakarta pada semester gasal tahun akademik 2008-2010.

Tesis ini sesuai dengan judulnya: **Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.** Tema mengenai hak asasi manusia mengundang perhatian penulis untuk meneliti mengenai keberadaan organisasi di Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Keberadaan organisasi tersebut dari perspektif hak asasi manusia merupakan implementasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia namun bagaimana apabila dihadapkan dengan asas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang telah terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sebuah konsensus bersama.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada:

1. Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H., selaku pembimbing dan penguji tesis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang telah memberi masukan terhadap pembuatan tesis ini.
3. Prof.Dr. Abdul Barie Azed, S.H., M.H., dan Dr. Fatmawati, S.H., M.H., selaku penguji tesis yang telah memberi masukan demi kesempurnaan penulisan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini.
4. Para dosen beserta staf pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik penulis.
5. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan.
6. Lucia Sri Lestari dan Drs. Thomas A. Slamet Riyanto sebagai orang tua penulis atas doa, kasih sayang, kesabaran, nasihat, dan dorongan yang diberikan pada penulis sejak penulis kecil.
7. Saudara-saudara penulis yaitu Ir. Silvia Ridina Dewi, M.M., Bonivasius Risa Wibowo, S.T., M.T., dan Elysabeth Riama Wardhani, S.E., M.M. yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

8. Bapak Gutmen Nainggolan, S.H., M.Hum (Kasubag Naskah Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), dan Drs. Denty Ierdan, M.M. (Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) yang bersedia meluangkan waktu dan memberi kemudahan bagi penulis dalam wawancara dan mendapatkan data-data sebagai penunjang penulisan tesis ini.
9. Teman-teman sekelas Hukum Tata Negara kelas sore angkatan 2008 yang selalu mendukung dan kompak dalam semangat selama perkuliahan dan membantu penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu di sini, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi, metodologi, maupun teknis penulisan. Namun penulis sangat berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Jakarta, 7 Juni 2010

Penulis

Theresia Rifeni Widiartati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	
1. Hak Asasi Manusia	10
2. Organisasi Kemasyarakatan	16
3. Ideologi	18
E. Kerangka Konsepsional	21
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Nomenklatur dan Hakikat Organisasi Kemasyarakatan	29
1. Nomenklatur Organisasi Kemasyarakatan	29
2. Hakikat Organisasi Kemasyarakatan	30
3. Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan	34
4. Status Hukum Organisasi Kemasyarakatan	43
B. Sejarah Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan	46
1. Timbulnya Gagasan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik	48
a. Secara Konstitusional	48
b. Sejarah Bangsa Indonesia menerima Pancasila sebagai falsafah negara	50

2. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983	52
C. Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985	55

BAB III IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Pengertian dan Hakikat Ideologi	65
1. Pengertian Ideologi	65
2. Hakikat Ideologi	69
B. Tipe-Tipe Ideologi	70
1. Ideologi Tertutup	71
2. Ideologi Terbuka	72
C. Ideologi Dunia	73
D. Ideologi dan Hukum	76
E. Pancasila	
1. Sejarah Perumusan Ideologi Pancasila	77
a. KeTuhanan Yang Maha Esa	82
b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	83
c. Persatuan Indonesia	84
d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	86
e. Keadilan Sosial Yang Adil dan Beradab	88
2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia	90
3. Pancasila dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	94
a. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966	94
b. Ketetapan No. XXV/MPRS/1966	95
c. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	96
d. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)	96
e. Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 tentang Peraturan Tata Tertib MPR	96
f. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara	97
g. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan	

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 97

4. Pancasila Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Negara 98

BAB IV TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia	101
1. Hakikat Hak Asasi Manusia	101
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	103
B. Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia	104
1. Hak Asasi Manusia di Inggris	105
a. Magna Charta	106
b. Petition of Rights	106
c. Habeas Corpus Act	107
d. Bill Of Rights	107
2. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat	108
3. Hak Asasi Manusia di Perancis	109
4. Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	111
C. Tradisi Hak Asasi Manusia	115
1. <i>Liberté</i> : Hak Sipil Politik	116
2. <i>Égalité</i> : Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	117
3. <i>Fraternité</i> : Hak Solidaritas	118
D. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	120
1. Pembatasan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	122
2. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945	125
E. Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul	137

BAB V ANALISIS YURIDIS PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PANCASILA

A. Implementasi Pembatasan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Menurut Pasal 28 UUD 1945	142
1. Hakikat Pembatasan Kemerdekaan	142
2. Pembatasan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Menurut Pasal 28 UUD 1945	145
a. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Organisasi Kemasyarakatan dalam Asas Pancasila	146

b. Perbandingan Pengaturan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Ideologi Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan	148
c. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	152
d. Perbandingan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul pada Organisasi Kemasyarakatan di Berbagai Negara	154
(1) Cina	154
(2) Rumania	159
(3) Korea Utara	163
(4) Kuba	164
(5) Angola	166
 B. Peraturan Perundangan-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan Indonesia Berdasarkan Pancasila	178
1. Era Orde Lama	180
2. Era Orde Baru	182
a. Kewajiban bagi Ormas dan LSM untuk berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas	185
b. Kewenangan Pemerintah (khususnya Kementerian Dalam Negeri) untuk bertindak selaku pembina Ormas dan LSM	187
3. Era Reformasi	190

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	193
B. Saran	194

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	196
B. Artikel, Jurnal Ilmiah, dan Kamus	199
C. Tesis dan Disertasi	200
D. Internet	201
E. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan	205
F. Lainnya	206

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Klasifikasi Organisasi Masyarakat berdasar Aspek Kehidupan ...40

Tabel 4.1

Hak Individu/Kelompok136

Tabel 5.1

Pengaturan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan149



DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1

Klasifikasi Organisasi 39

BAGAN 3.1

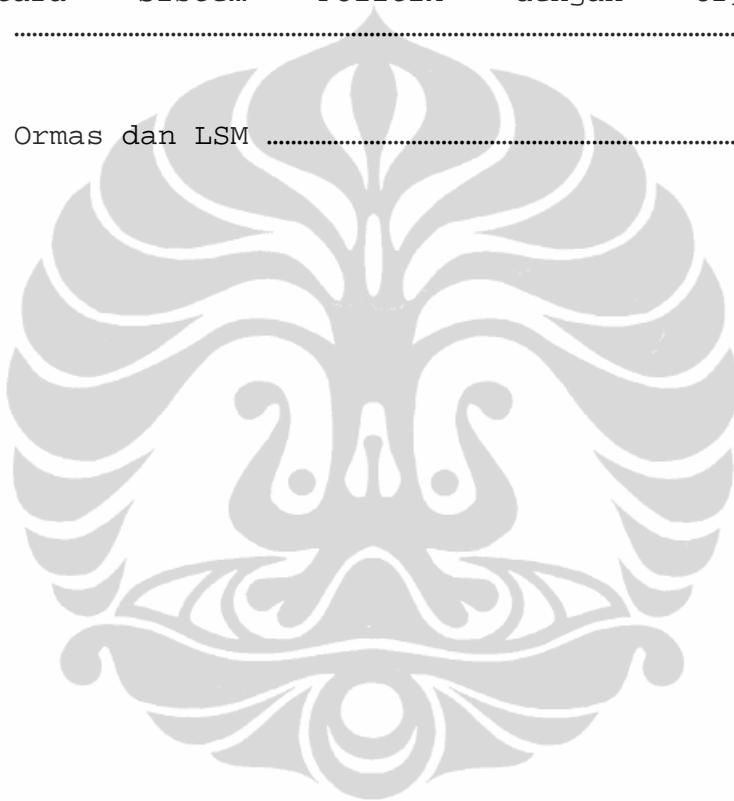
Peta Pengembangan Daerah Versi Jepang 79

BAGAN 5.1

Hubungan antara Sistem Politik dengan Organisasi Kemasyarakatan 173

BAGAN 5.2

Diagram Jumlah Ormas dan LSM 188



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2002
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN II

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2003
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN III

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2004
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN IV

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2005
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN V

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2006
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN VI

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2007
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN VII

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN VIII

Data Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2009
Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

LAMPIRAN IX

*Staatblaad van Nederlandsch-Indie Regtspersoonlijkheid 1870
No. 64
Sumber: Batavia Ter Landsdrukkerij 1870.*

LAMPIRAN X

Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) Keputusan Raja 28 Maret 1870, S- 1870-64
Sumber: <http://www.legalitas.org/database/staatsblad/stb1870-64.pdf>.

LAMPIRAN XI

Statuten Moefakat "Boedijotama" Dikota Jogjakarta.
Sumber: Yayasan Idayu 1975.

LAMPIRAN XII

"Huishhoudelijk Reglement" (Anggaran Rumah Tangga) Moefakat "Boedijotama" di Jogjakarta
Sumber: Yayasan Idayu 1975.

ABSTRAK

Penulisan tesis yang berjudul "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dari perspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui peran negara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakat sehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasi kemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridis keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang tersebut mewajibkan menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalah Apakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebagai proses pendemokratisasi yang berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasi manusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasila terhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yaitu "ditetapkan dengan undang-undang" tersebut itu menjadi dasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawab untuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itu bertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dari indikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itu sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlu segera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)